



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, perlu disusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Eka Budiawan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
i	Manajemen Perubahan				
Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Membentuk Tim Pembangunan ZI	SK Tim Pembangunan ZI yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bengkayang	Oktober 2025
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Bengkayang	Oktober 2025
		Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disosialisasikan		Sosialisasi Rencana Aksi dipublikasi melalui website KPU Kabupaten Bengkayang	Oktober 2025

1	2	3	4	5	6
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Desember 2025
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor serta berkontribusi dalam rapat pleno	Dokumentasi Apel dan Rapat Pleno, Banner, SK budaya kerja, daftar hadir harian	Oktober-Desember 2025
ii Penata Tata Laksana					
1	Prosedur Operasional Tetap	Penyusunan dan pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP serta melakukan perbaikan SOP berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan SOP	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notula, hasil monitoring	Oktober 2025
2	(e-office/ e-govemment)	Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem informasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan SDM dan pemberian layanan kepada publik	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notula, hasil monitoring, laporan evaluasi pelayanan publik (Screenshot penggunaan aplikasi)	Oktober-Desember 2025
3	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan informasi publik (berkala, serta merta dan tersedia setiap saat) pada laman unit kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notula Rapat DIP, hasil monitoring, website KPU Kabupaten Bengkayang, laporan Tahunan keterbukaan informasi, SK DIP	Oktober-Desember 2025
iii Penataan Manajemen dan Sumber Daya Manusia					
1	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Pegawai	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notula, ST Penugasan, screenshot, kegiatan e-learning, dokumentasi lainnya	Oktober-Desember 2025
2	Penetapan Kinerja Individu	Penetapan Kinerja Individu untuk Pejabat Eselon III dan IV dan rencana aksi	Menyusun cascading kinerja pegawai	Dokumen Kinerja Individu dan SKP	Oktober-Desember 2025
3	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Laporan Disiplin Pegawai	Sosialisasi Regulasi serta pembinaan SDM	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notula, Laporan, SPIP	Oktober 2025

1	2	3	4	5	6
4	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja	Pemutakhiran data kepegawaian	Data pegawai, screenshot, SIMPEG	Oktober-Desember 2025
iv	Penguatan Akuntabilitas				
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan Unit Kerja terlihat dalam penyusunan Renja dan Penetapan Kinerja	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran rencana kerja tahunan sebagai dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notula, PK, Dokumentasi Penandatanganan PK	Oktober-Desember 2025
2	Pengelolaan Akuntabilitas	Penyusunan Renja, dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Dokumen SAKIP	Oktober 2025
v	Penguatan Pengawasan				
	Pengendalian Gratifikasi				
1	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Bengkayang. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi	Notula, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, undangan, pakta integritas setiap pegawai	Oktober-Desember 2025
				Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi, Dokumen Deklarasi Penandatanganan Deklarasi RB	Oktober-Desember 2025
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat menggunakan media sosial/laman daring	Notula, foto kegiatan, undangan, sosialisasi dokumen kegiatan	Oktober-Desember 2025
				Banner "Tolak Gratifikasi" dan <i>tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring, website di beranda	Oktober-Desember 2025
				Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	Oktober-Desember 2025

1	2	3	4	5	6
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Pengendalian Gratifikasi	KPU Kabupaten Bengkayang membuat laporan pengendalian gratifikasi	Laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi	Desember 2025
4	Survei Persepsi Anti Korupsi KPU Kabupaten Bengkayang	Terlaksananya survei persepsi anti korupsi KPU Kabupaten Bengkayang kepada masyarakat	Melaksanakan survei	Laporan survei	Desember 2025
5	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada website dan media sosial KPU Kabupaten Bengkayang	Tampilan website dan media sosial tentang anti gratifikasi di KPU Kabupaten Bengkayang	Desember 2025
Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Bengkayang					
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Teridentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur Penanganan/Pencegahan	Menyusun tabel identifikasi benturan kepentingan	SK benturan kepentingan	Oktober-Desember 2025
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Penyampaian Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Bengkayang berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai penanganan benturan kepentingan, banner bentuk-bentuk benturan kepentingan	Oktober-Desember 2025
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya benturan kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	Oktober 2025
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Melakukan monitoing dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Oktober-Desember 2025
Pembangunan SPIP di lingkungan unit KPU Kabupaten Bengkayang					
1	Membangun Lingkungan Pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP	Oktober-Desember 2025
				Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Oktober-Desember 2025
2	Penilaian Risiko Unit Atas Pelaksanaan Kebijakan	Menyusun Peta Risiko	Melakukan penyusunan peta risiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian	Laporan penyusunan peta risiko, daftar risiko	Oktober-Desember 2025

1	2	3	4	5	6
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Merumuskan kebijakan pengendalian risiko	Dokumen Pengendalian, Notula, Daftar Hadir, Undangan	Oktober-Desember 2025
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada pihak terkait	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada pihak terkait	Screenshot E-SPIP	Oktober-Desember 2025
Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU					
1	Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat <i>hotline (call center)</i> dan alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Bengkayang, email pengaduan masyarakat perubahan SK, SOP	Oktober-Desember 2025
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Inspektorat menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Bengkayang, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Oktober-Desember 2025
3	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses	Infografis DUMAS	Oktober-Desember 2025
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Oktober-Desember 2025
4	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi DUMAS	Rapat monev per triwulan untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat	Notula, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2025
5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Desember 2025
vi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1	Standar Pelayanan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Reviu dan publikasi standar layanan	Maklumat pelayanan, standar pelayanan informasi, SOP pelayanan PPID, foto petugas pelayanan PPID	Oktober-Desember 2025
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan inovasi pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi dan publikasi SK budaya kerja, SK reward dan punishment	SK reward dan punishment, screenshot publikasi di website	Oktober-Desember 2025

1	2	3	4	5	6
3	Pengelolaan Pengaduan	Pelaksanaan penerimaan pengaduan	Melaksanakan pelayanan masyarakat secara luring dan daring	Laporan Pengaduan Masyarakat	Oktober-Desember 2025
4	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan atas layanan	Publikasi hasil survei dan tindak lanjut hasil survei	Laporan dan publikasi	Oktober-Desember 2025
5	Pemantauan Formasi	Pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi	Melaksanakan pelayanan melalui Whatsapp, e-PPID dan media sosial	Laporan Pelayanan Publik	Oktober-Desember 2025

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HERIBERTUS

Eka Budiawan

